

Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember

Vianney Dwi Puspita Sari¹, Agus Suharsono², Boedijono³
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

vianneypuspitasari@gmail.com

Abstract

Corona Virus Disease (Covid 19) is a virus is spreads to almost all countries, including Indonesia. The spread of Covid-19 has had an impact on various fields, one of which is education. One of the government's efforts to overcome this impact is to implement policies to prevent the spread of Covid-19 in universities. In accordance with this policy, the Chancellor of the University of Jember issued the rector's circular letter number 4687/UN25/LL/2020 regarding the prevention of the spread of Covid-19. The purpose of this study is to describe the policy of preventing the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) at the University of Jember. This type of research is descriptive qualitative research with the type of data consisting of primary data and secondary data obtained by interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the University of Jember has implemented policies to prevent the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) well in terms of communication, resources, disposition and organizational structure. So that students can still get the right to carry out learning and still comply with health protocols.

Keywords: Covid-19, Implementation of Policies to Prevent the Spread of Covid-19

1. Pendahuluan

Virus Corona atau *Coronavirus Disease of 2019* adalah virus yang menyerang system pernapasan (www.kominfo.go.id). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan Covid-19 dengan melaksanakan langkah pencegahan seperti berikut; (1) rajin mencuci tangan menggunakan sabun, (2) menggunakan masker, (3) menjaga jarak minimal 1 meter, (3) tidak menyentuh hidung, mulut dan wajah, (4) meningkatkan daya tahan tubuh dan (5) melakukan disinfeksi benda (sumber: buku panduan kampus siaga Covid-19, 2020:3). Pemerintah juga telah berusaha untuk menekan penyebaran rantai Covid-19 dengan membuat dan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah mempengaruhi berbagai sektor, tidak hanya mempengaruhi sektor perekonomian yang terpuruk saja melainkan sektor pendidikan juga terkena imbasnya.

Menurut Winanti dan Mas'udi mengatakan dampak Covid-19 terjadi pada semua sendi kehidupan, bahkan 80% dampaknya terjadi pada sektor non-kesehatan (2020;4). Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan agar pembelajaran langsung di sekolah dan perguruan tinggi diberhentikan untuk sementara waktu dan digantikan dengan sistem pembelajaran secara daring. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia kerja dimana pelaksanaan bekerja langsung di tempat kerja di kurangi dan

diterapkannya “*Work From Home*” (*WFH*) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. (Sumber data; kompas.com diakses pada tanggal 16 Februari 2020).

Salah satu usaha yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan akibat dampak COVID-19 yaitu dengan membuat sebuah kebijakan tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang isinya meliputi pembelajaran secara daring, himbauan kewaspadaan Covid-19, *safety civitas* kampus, dan pembatasan jumlah civitas yang berada di kampus. Kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* tersebut termuat ke dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam proses pencegahan penyebaran Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat No. 36962/MPK.A/HK/2020 pada bulan Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Surat tersebut menunjukkan kepedulian dan peran serta kampus dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Universitas Jember. Saat ini, telah terdapat 280 perguruan tinggi yang mengikuti himbauan tersebut. tak terbilang banyaknya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat kampus dalam pengendalian Covid-19. Masyarakat kampus adalah masyarakat dengan tingkat literasi tinggi dan memiliki tingkat ekonomi yang baik. Masyarakat kampus memiliki peran yang sangat strategis untuk berpartisipasi dalam pengendalian Covid-19 (sumber: buku panduan kampus siaga Covid-19, 2020:3).

Rektor Universitas Jember berdasarkan hasil rapat pada tanggal 16 Maret 2020 menghasilkan Surat Edaran Rektor Unej Nomor 4687/UN25/LL/2020 sebagai dasar implementasi kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember. Pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam metode pembelajaran yang diubah untuk sementara waktu menjadi pembelajaran secara *daring* maka dibutuhkan keterampilan penguasaan teknologi informasi untuk dapat mengola *platform* pembelajaran *daring* agar mahasiswa dapat antusias dalam mengikuti pembelajaran *daring*, sehingga *learning outcome* dapat tercapai secara maksimal.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengurangan jumlah civitas yang bekerja di kampus sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19, Universitas Jember menerapkan aturan atau kebijakan pembagian waktu kerja bagi pejabat dan staff. Pembagian waktu kerja bagi pejabat dan staf diatur oleh kepala sub bagian secara merata dan bertanggung jawab. Merata dan bertanggung jawab disini adalah waktu jam kerja di kampus dan bekerja dari rumah harus adil danimbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember. Sehingga dengan demikian riset ini dapat memberikan kegunaan bagi akademis sebagai tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara. Juga dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, menetapkan dan melaksanakan berbagai langkah maupun kendala dalam upaya melaksanakan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember.

Paradigma Administrasi

Menurut (Muhammad, 2019, hal.41) paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari kebenaran dan konsep. Henry Fayol (dalam Muhammad, 2019, hal.41) paradigma Administrasi publik diklasifikasikan menjadi lima paradigma yaitu:

- a. Paradigma I : dikotomi administrasi (1900-1929)
- b. Paradigma II : prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)
- c. Paradigma III : administrasi publik sebagai ilmu politik (1940-1970)
- d. Paradigma IV : administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
- e. Paradigma V : administrasi publik sebagai administrasi publik

Pada paradigma ini, administarasi negara berfokus pada teori manajemen, teori organisasi dan proses kebijakan publik. Sedangkan lokusnya pada masalah-masalah publik. Berdasarkan penjelasan paradigma menurut Henry Fayol di atas, penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember termasuk dalam paradigma V tentang administrasi publik sebagai administrasi publik karena sama-sama memiliki fokus pada teori kebijakan publik sebagai solusi atas masalah publik.

Pada paradigma ini, administarasi negara berfokus pada teori manajemen, teori organisasi dan proses kebijakan publik. Sedangkan lokusnya pada masalah-masalah publik. Berdasarkan penjelasan paradigma menurut Henry Fayol di atas, penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember termasuk dalam paradigma V tentang administrasi publik sebagai administrasi publik karena sama-sama memiliki fokus pada teori kebijakan publik sebagai solusi atas masalah publik.

Kebijakan Publik

Thomas R. Dye 1992, (dalam Anggaran, 2018, hal.35) mendefinisikan “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip dalam Leo Agustino (2014;02) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan) dan kesempatan - kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

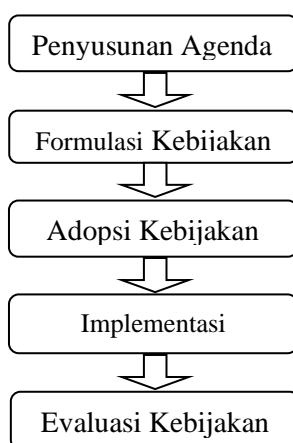
Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2007:18), kebijakan publik yaitu “merupakan suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatai masalah yang ada di masyarakat dalam bentuk perundang-undangan, keputusan atau program.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, pilihan pemerintah merupakan upaya terbaik untuk mengatasi permasalahan publik berdasarkan tercapainya tujuan negara. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, pilihan pemerintah merupakan upaya terbaik untuk mengatasi permasalahan publik berdasarkan tercapainya tujuan negara. Dari

beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, pilihan pemerintah merupakan upaya terbaik untuk mengatasi permasalahan publik berdasarkan tercapainya tujuan negara.

Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, oleh karena itu ahli politik menaruh minat membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik (Winarno, 2012, hal.36) sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012, hal.148) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa variabel yang saling berkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi George C. Edward III untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

George C. Edwards III dalam (Winarno, 2012, hal.177) mengemukakan Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam teori George C. Edward III terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber–sumber, kecenderungan - kecenderungan, atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2. Sumber Daya

Sumber-sumber merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3. Sikap (*Disposition*)

Disposition berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya ketersediaan pelaksana untuk mengimplementasikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah kesesuaian penyelenggara implementasi kebijakan dalam suatu organisasi birokrasi. Struktur birokrasi biasanya memiliki prosedur kerja ukuran dasar (*Standart Operating Procedure*) yang menjadi pedoman pelaksanaan aktivitas organisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari George Edward III karena model Edward III yang dirasa sesuai dengan apa yang ingin peneliti lihat dan teliti, dan model Edward III juga merupakan model yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Selain itu, model ini merupakan model *top-down* yang sesuai dengan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena dengan metode ini peneliti dapat mengetahui cara pandang objek penelitian secara lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti mengumpulkan data dalam kondisi yang asli atau alamiah. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Jember. Terdapat beberapa informan sebagai sumber data sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Nama – Nama Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Prof. Drs. Slamini, M.Comp. Sc., Ph.D.	L	Wakil Rektor 1 Universitas Jember
2.	Drs. Supranoto. M.Si., Ph.D	L	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3.	Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M. AP.	P	Kaprodi + Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
4.	Drs. Yagus Wijayanto. MA., Ph.D	L	Kaprodi + Dosen Fakultas Pertanian
5.	dr. Cholis Abrori, M.Kes., M.Pd.Ked	L	Dosen Fakultas Kedokteran
6.	FX. Kristanta, M.Eng.	L	Dosen Fakultas Teknik
7.	Drs. IG Krisnadi M.Hum	L	Dosen Fakultas Ilmu Budaya

8.	Anita Widjajanti,S.S.,M.Hum	P	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9.	Dedy Trisaksono,S.Kom	L	Kepala Bidang Aplikasi dan Perangkat Lunak UPTTIK
10	Reviangga Dika Satyatama, S.Kom	L	Kepala Bidang Basis Data UPTTIK
11	Yovita Karina	P	Mahasiswa Fakultas Kedokteran
12	Felicia Ivana Putri	P	Mahasiswa Fakultas Kedokteran
13	Dinda Alfy	P	Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
14	Bernadette Petria Pinasthika	P	Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
15	Gregorious Edo	L	Mahasiswa Fakultas Teknik
16	Devadha	P	Mahasiswa Fakultas Teknik
17	Valensia Serafim Pantouw	P	Mahasiswa Fakultas Pertanian
18	Fathurozi Azzar	P	Mahasiswa Fakultas Pertanian
19	Fransisca Yunita	P	Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya
20	Riska Ayu Pradila	P	Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
21	Imanda Auliana	P	Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

3. Hasil dan Diskusi

Memperhatikan kondisi global yang sedang melanda dengan merebaknya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memperhatikan kondisi terakhir Indonesia yang menetapkan sebagai kondisi darurat dengan melaksanakan *lockdown* dan secara khusus Universitas Jember yang berada di wilayah Kabupaten Jember yang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang harus melaksanakan kewaspadaan eksta, disamping dua wilayah lain di Jawa Timur yaitu, Surabaya dan Malang sebagaimana informasi dari Dinas Kesehatan Jawa Timur Maret 2020 (Surat edaran dan petunjuk teknis bekerja dari rumah Universitas Jember, 2020).

Universitas Jember telah menyikapi pencegahan *COVID-19* dengan melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran secara *daring* sejak pertengahan bulan Maret 2020 hingga saat ini dengan terus melakukan evaluasi perkembangan kondisi penyebaran *COVID-19* di sekitar Jember. Universitas Jember melaksanakan langkah-langkah preventif dengan mengurangi risiko berkumpulnya staff, dosen dan mahasiswa dengan melaksanakan kebijakan pembelajaran *daring* dengan tetap memperhatikan produktivitas kerja selama pelaksanaan pembelajaran *daring*.

SOP (Standar Operasional Prosedur) di Univesitas Jember dalam mengatur pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) terdapat pada Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomer 4687/UN25/LL/2020 tentang Pencegahan Covid-19, maka berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan di lingkungan Universitas Jember yang dilaksanakan tanggal 16 Maret 2020, bahwa dalam upaya meningkatkan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Universitas Jember didalamnya sudah tertera dengan jelas pedoman dan aturan yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran *daring* dilaksanakan baik dalam hal pemberian materi, ujian, kuis, KKN (Karya Kerja Nyata), praktikum,

penelitian hingga pelaksanaan wisuda. Universitas Jember melalui Wakil Rektor 1 yang diberi tugas untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan yang ada di Universitas Jember salah satu satunya kebijakan pembelajaran *daring* selalu berusaha untuk mengevaluasi dan melihat kondisi Covid-19 saat ini. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh warga lingkungan Universitas Jember, baik staf/karyawan, dekan fakultas, UPT, ketua lembaga, dosen dan mahasiswa.

Hasil SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam surat edaran rektor Universitas Jember nomor 4687/UN25/LL/2020 tentang pencegahan Covid-19, di lapangan adalah sesuai dengan yang tertulis dalam surat edaran. Dimana pelaksana KKN (Karya Kerja Nyata) dilaksanakan secara *daring* di kota asal masing-masing dan tetap dilaksanakan selama 40 hari. Kegiatan ujian baik seminar proposal, seminar hasil dan sidang untuk sementara dilaksanakan secara *daring* melalui *Zoom*. Kegiatan praktikum juga ditiadakan untuk mengurangi kerumunan, praktikum diganti dengan pemberian tugas dan dosen memberikan video praktikum agar dapat dilihat dan dipelajari oleh mahasiswa. Kegiatan wisuda secara langsung juga ditiadakan dan diganti dengan wisuda *online* melalui *Zoom* dan disediakan fasilitas tempat cuci tangan dan *handsanitizer* sebagai langkah untuk menjaga protokol kesehatan di lingkungan kampus.

Selanjutnya, dalam melihat implementasi kebijakan kebijakan pembelajaran pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember yang dilihat melalui model implementasi Edward III yaitu, Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan pada saat di lapangan, bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), peneliti menilai sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat selama penelitian di lapangan baik kantor pusat, UPTTIK dan dosen sudah berusaha semaksimal mungkin agar mahasiswa dapat nyaman dan paham selama pelaksanaan pembelajaran *daring*. Namun selama pelaksanaan tetap ada kendala seperti mahasiswa selama pembelajaran *daring* kurang paham terhadap materi yang dijelaskan dosen melalui *zoom*, tidak dapat melaksanakan praktikum secara langsung, pembelajaran *daring* tidak efektif dalam pelaksanaan bimbingan. Kendala tersebut disebabkan karena setiap dosen memiliki cara komunikasi, kreatifitas dan peraturan pembelajaran yang berbeda dari masing-masing dosen.

Selanjutnya, Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dikumpulkan, sumber daya pada pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember sudah baik dimana dengan adanya metode pembelajaran *daring* mewajibkan dosen maupun mahasiswa untuk melek dan tanggap akan teknologi sehingga literasi digital dapat menyeluruh, lebih efisien waktu dan dosen lebih kreatif dalam menjelaskan materi. Meskipun pada awal pelaksanaan kebijakan pembelajaran *daring*, terdapat banyak kendala dalam menggunakan media pembelajaran namun dapat dengan mudah teratasi.

Sumber daya anggaran di Universitas Jember tertata dengan jelas dan terwujud dalam penyediaan fasilitas dan sarana prasana selama pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Seperti melakukan *fresh install* terhadap *server Sister* sehingga dapat menampung kelas dan *audience* lebih banyak, sewa *Zoom* sehingga waktu penggunaan tidak terbatas, bantuan kuota internet dari pemerintah, laboratorium komputer di setiap fakultas, gedung, laboratorium, alat praktikum dan *Wifi* untuk menunjang pembelajaran *daring*.

Selanjutnya dalam faktor sikap merupakan bentuk komitmen yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, masih terdapat mahasiswa maupun dosen yang mengeluhkan pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan menggunakan metode pembelajaran *daring*. Mahasiswa juga masih kurang bersikap mandiri, antusias dan rajin dalam pelaksanaan pembelajaran. Fakta di lapangan terdapat dosen yang mengeluhkan mahasiswa yang hanya mengikuti *Zoom* saja tapi tidak *oncamera* dan saat dipanggil namanya tidak merespon hal tersebut dikarenakan kurangnya sikap antusias dan komitmen dari mahasiswa. Selain itu, dosen juga masih melaksanakan sikap yang kurang kreatif dalam memberikan materi dan banyak dosen yang hanya memberikan tugas saja tanpa menjelaskan materi. Sikap - sikap tersebut harus dirubah dan masing-masing individu baik dosen maupun mahasiswa memiliki komitmen agar pelaksanaan pembelajaran *daring* dapat dilaksanakan dengan baik pada saat masa pandemi maupun di masa normal.

Dan yang terakhir dari segi struktur birokrasi dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember telah terstruktur dengan rapi dan jelas sehingga pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) berjalan dengan baik, masing – masing individu baik kantor pusat, UPTTK, dosen dan mahasiswa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kantor pusat melalui wakil rektor I bertugas untuk membuat kebijakan, melaksanakan monitor dan penilaian. UPTTIK yang bertugas untuk mengatur dan membantu menyediakan media penunjang pembelajaran, dosen yang berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran karena bertugas untuk menjelaskan materi. Sedangkan mahasiswa bertugas untuk mengikuti pembelajaran dan belajar lebih mandiri. Semua tugas dan tanggung jawab tersebut sudah tersusun dengan jelas.

4. Kesimpulan

Kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah di bidang pendidikan yaitu akibat adanya Covid-19 pelaksanaan pembelajaran untuk sementara tidak dapat dilaksanakan secara langsung di kampus sehingga pemerintah membuat kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang didalamnya memuat metode pembelajaran alternatif yang dapat digunakan selama masa darurat Covid-19 yaitu pembelajaran *daring*. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa tetap dapat mendapatkan hak dan kewajibannya untuk belajar di masa darurat Covid-19 saat ini.

Berdasarkan penyajian hasil dan analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember sudah cukup baik dan dapat digunakan sebagai media alternatif maupun media pembelajaran di masa depan. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas dan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh kampus, bantuan paket data, penurunan dan penundaan UKT dan media pembelajaran seperti *SISTER*, *Zoom*, *BBB*, tempat cuci tangan dan *handsanitizer*. Meskipun pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Jember sudah cukup baik namun masih terdapat kendala yang harus diperbaiki yaitu dalam pelaksanaan praktikum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdoellah & Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bilfaqih & Qomarudin. (2015). *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring: Panduan Berstandar Pengembangan Pembelajaran Daring untuk Pendidikan dan Pelatihan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Buku Panduan Kampus Siaga Covid-19*. Jakarta
- J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Miarso, Yusufhadi. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Public yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Siyoto & Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, prinsip dan operasional*. Tulungagung : Akademia Pustaka.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintah*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Universitas Jember. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember : Universitas Press.
- Universitas Jember. (2021). *Buku Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Universitas Jember*. Jember: Universitas Jember.

Jurnal :

- Hartanto, Beni. (2020). *Pelaksanaan Kebijakan Pembelajaran Melalui Media Daring*, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 1(3) hal 21.
- Ramdhani & Ali Ramdhani. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(1) hal 18.
- Suharsono, Agus. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Jarak Jauh di Kementerian Keuangan*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16 (1) hal 68.
- Syamsir Ahmad, Idah Wahidah, dkk. (2020). *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring di Tengah Pandemi Coronavirus Disease 2019*. *Jurnal Administrasi Publik* (2) hal 32.

Peraturan :

- Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3. (2020). <http://pgdikmen.kemendikbud.go.id/read-news/surat-edaran-mendikbud-nomor-3-tahun-2020>
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4. (2020). www.kemendikbud.go.id
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1. (2020).
- Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor: 4687/UN25/LL/2020. (2020).

Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor: 6256/UN25/LL/2020. (2020).
Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor: 8768/UN25LL/2020. (2020).

Internet:

Unej.ac.id